**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

**(Studi Pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015-2107)**

**ABSTRAK**

MARIA MACHTHILDIS SITANGGANG. 15061150. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

(Studi pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015-2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2015-2017. Alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang diolah adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2017 yang didapatkan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat Kemandirian daerah Kabupaten Flores Timur berada pada kriteria instruktif. Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sangat kurang, namun tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur terbilang kurang efektif dan tingkat Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur terbilang tidak efisien. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan keseimbangan antar belanja belum seimbang. Rasio Pertumbuhan tahun bersangkutan besar dibandingkan tahun sebelumnya, daerah bisa mandiri dengan dana transfer yang semakin kecil seiring dengan tingginya PAD.

**Kata Kunci: Analisis Rasio Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja dan Rasio Pertumbuhan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

**ABSTRACT**

*MARIA MACHTHILDIS SITANGGANG. 15061150. THE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF EAST FLORES LOCAL GOVERNMENT*

*(A study of Local Government Financial department fiscal year 2015-2017)*

This research aims to find out the financial performance of east flores local government in 2015-2017. The analysis instrument was finance ratio. The finance ration used by the researcher included finance independence ratio, fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio, expense accord ratio, and growth ratio. This is a descriptive research. The data used in this research was the Budget Outcomes Report of Local Government's Incomes and Expenses fiscal year 2015-2017 which was obtained from the local Government Financial department. Based on the results from the calculation and analysis of Financial performance, it can be concluded that the independence relation pattern of East FLORES Local Government is on instructive criterion. The fiscal decentralization degree of east FLORES Local Government is very lacking. The effectiveness of the financial management can be said to be less effective and the financial management efficiency is inefficient. The expense accord ratio is unbalanced. The growth ratio in the respective year is bigger than the previous year, the local Government can be independent by the lessen transferred budget along with the higher PAD. **Keyword: the analysis of local Government budget financial ratio, local Government financial performance**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintah pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Untuk itu masyarakat atau penduduk yang memegang peranan penting menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevalasi kinerja pemerintah, mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dan meyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terdiri dari rasio kemandirian, rasio rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis yaitu bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2015-2017 berdasarkan analisis rasio keuangan.

**Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2017.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Sumber-sumber Pendapatan Daerah**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

**Analisis Laporan Keuangan**

Fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tetapi tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan. Untuk membantu mengatasi ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut, maka perlu dibantu dengan Analisis Laporan Keuangan. Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan.

**Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Analisis Kinerja Keuangan Adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sistem pengukuran kinerja keuangan sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur *financial* maupun *nonfinancial*. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu :

1. Rasio Kemandirian Keuangan

Halim, 2012 (dalam Muhibtari, 2014:36) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

$$Rasio Kemandirian=\frac{Pendapatan Asli Daerah }{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}x 100\%$$

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$Derajat Desentralisasi Fiskal=\frac{Pendapatan Asli Daerah}{Total Pendapatan Daerah}x 100\%$$

1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efejtif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi Rasio Efektivitas (RE), menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$Rasio Efektivitas=\frac{Realisasi Penerimaan PAD}{Target Penerimaan PAD berdasarkan Potensi Riil Daerah}x 100\%$$

1. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$Rasio Efisiensi=\frac{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}{Realisasi Penerimaan PAD}x 100\%$$

1. Rasio Keserasian Belanja

Menurut Mahmudi 2010 (dalam Muhibtari 2014:39), Analisis Rasio Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Belanja tidak langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan.

$$Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja=\frac{Total Belanja Tidak Langsung}{Total Belanja Daerah}$$

$$Rasio Belanja Langsung terhadap APBD=\frac{Total Belanja Langsung}{Total Belanja Daerah}$$

1. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$Rasio Pertumbuhan=\frac{PADt-PADt-1}{PADt-1}$$

**Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Muhibtari (2014) dengan judul analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Magelang tahun anggaran 2008-2012. Variabel penelitian terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, perhitungan *share* dan *growth*, analisis peta kemampuan keuangan daerah dan menghitung indeks kemampuan keuangan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa 1) Pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Kota Magelang berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah, 2) Kondisi kemampuan keuangan kota magelang masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan *share* dan *growth*.
2. Sijabat, dkk (2014) dengan judul analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Variabel penelitian terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan dan analisis surplus/defisit dan pembiayaan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa Kemampuan keuangan Kota Malang mengalami kecendrungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio DOF 13,67% dan IKR 18,01%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan serta kinerja keuangan Kota Malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada Badan Keuangan Daerah pada bidang akuntansi yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

**Metode Pengumpulan Data**

**Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur tahun Anggaran 2015-2017 yang didapatkan dari Badan Keuangan Daerah. Data tersebut merupakan dokumentasi dari Laporan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017.

**Metode Analisa Data**

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini antara lain:

1. Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh.
2. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan.
3. Menghitung Kinerja Keuangan Pmerintah Kabupaten Flores Timur ditinjau dari rasio keuangan tahun 2015-2017.
4. Penyimpulan Hasil Perhitungan

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Penelitian**

**Sejarah Pembentukan Kabupaten Flores Timur**

Kabupaten flores timur pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Undang-Undang tersebut ditetapkan tanggal 20 Desember 1958 sehingga setiap tanggal 20 Desember diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Flores Timur.

**Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah**

**Visi :**

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel yang Didukung Oleh Aparat Pengelola Keuangan yang Profesional”

**Misi :**

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparat dan pelaksana pemungut pajak dan retribusi, pengelolaan keuangan dan managemen aset;
2. Meningkatkan pendapatan daerah terutama dari komponen PAD yakni pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
3. Meningkatkan Kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur**

1. Rasio kemandirian keuangan

Tabel 1. Rasio Kemandirian APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran | Realisasi Penerimaan PAD | Bantuan Pemerintah dan Pinjaman | Rasio Kemandirian | Pola Hubungan |
| 2015 | 47.561.063.030,01 |  798.121.777.056,00 | 5,96% | Instruktif |
| 2016 | 50.183.797.225,36 | 1.007.593.427.773,00 | 4,98% | Instruktif |
| 2017 | 74.121.511.057,89 |  979.940.341.216,06 | 7,56% | Instruktif |
| Rata-rata rasio kemandirian | 6,17% | Instruktif |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (Data Diolah)

Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dikatakan sangat rendah sekali, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan instruktif, yaitu berkisar antara 0%-25%. Dalam Pola Hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih dominan terhadap kemandirian Pemerintah Daerah. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah juga masih rendah. Padahal pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah, serta menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Flores Timur juga ikut meningkat. Tidak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah pun juga ikut meningkat, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran | Realisasi Penerimaan PAD | Total Pendapatan Daerah | Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal | Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal |
| 2015 | 47.561.063.030,01 |  845.682.840.086,01 | 5,62% | Sangat kurang |
| 2016 | 50.183.797.225,36 | 1.057.777.224.998,36 | 4,74% | Sangat kurang |
| 2017 | 74.121.511.057,89 | 1.066.061.852.273,95 | 6,95% | Sangat kurang |
| Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal | 5,77% | Sangat kurang |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (Data Diolah)

kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dikatakan sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.

1. Rasio Efektivitas

Tabel. 3 Rasio Efektivitas APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran | Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah | Realisasi Penerimaan PAD | Rasio Efektivitas | Kriteria Rasio Efektivitas |
| 2015 | 52.031.820.000,00 | 47.561.063.030,01 | 91,41% | Cukup efektif |
| 2016 | 53.825.738.100,00 | 50.183.797.225,36 | 93,23% | Cukup efektif |
| 2017 | 90.212.914.900,00 | 74.121.511.057,89 | 82,16% | Kurang efektif |
| Rata-rata rasio efektivitas | 88,93% | Kurang efektif |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (Data Diolah)

Tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dikatakan kurang efektif. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah lebih kecil dari yang dianggarkan sebelumnya. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih kurang efektif dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

1. Rasio Efisiensi

Tabel. 4 Rasio Efisiensi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran | Biaya Pemungutan PAD | Realisasi Penerimaan PAD | Rasio Efisiensi | Kriteria Rasio Efisiensi |
| 2015 |  854.679.822.593,00 | 47.561.063.030,01 | 1.797,01% | Tidak efisien |
| 2016 | 1.075.208.541.383,00 | 50.183.797.225,36 | 2.142,54% | Tidak efisien |
| 2017 |  815.428.057.287,00 | 74.121.511.057,89 | 1.100,12% | Tidak efisien |
| Rata-rata rasio rfisiensi | 1.679,89% | Tidak efisien |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (Data Diolah)

Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria Rasio Efisiensi, tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dikatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur belum dapat menekan belanjanya dari pada yang dianggarkan sebelumnya, namun jumlah pendapatan yang diperoleh masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya, sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

1. Rasio Keserasian Belanja
2. Rasio Belanja Tidak Langsung

Tabel. 5 Rasio Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran | Total Belanja Tidak Langsung | Total Belanja Daerah | Rasio Belanja Tidak Langsung |
| 2015 | 528.015.547.811,00 |  854.679.822.593,00 | 61,78% |
| 2016 | 680.268.900.096,00 | 1.075.208.541.383,00 | 63,27% |
| 2017 | 685.912.038.754,00 |  815.428.057.287,00 | 84,17% |
| Rata-rata rasio belanja tidak langsung | 69,74% |

 Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (Data Diolah)

Rasio Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 rasio belanja tidak langsung sebesar 61,78%, tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 63,27% dan di tahun 2017 naik menjadi 84,17%. Rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung selama tahun 2015-2017 sebesar 69,74%.

1. Rasio Belanja Langsung

Tabel. 6 Rasio Belanja Langsung APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran | Total Belanja Langsung | Total Belanja Daerah | Rasio Belanja Langsung |
| 2015 | 326.664.274.782,00 |  854.679.822.593,00 | 38,22% |
| 2016 | 394.939.641.287,00 | 1.075.208.541.383,00 | 36,73% |
| 2017 | 127.794.983.283,00 |  815.428.057.287,00 | 15,67% |
| Rata-rata rasio belanja langsung | 30,21% |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (Data Diolah)

Rata-rata Rasio Belanja Langsung Kabupaten Flores Timur selama priode 3 tahun sebesar 30,21%. Ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur lebih sedikit menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung dibandingkan untuk Belanja Tidak Langsung.

Dilihat dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Kedua rasio tersebut selisih 39,53%, berarti Pemerintah Daerah seharusnya bisa meningkatkan Belanja Langsung agar kualitas outputnya meningkat. Dan supaya fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik.

Menurut uraian dan perhitungan diatas, bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diperioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya pengeluaran dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum adanya patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Flores Timur kecil atau belum terpenuhi.

1. Rasio Pertumbuhan

Tabel. 7 *Growth Ratio* APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran | Realisasi PAD | *Growth Ratio* |
| 2015 | 47.561.063.030,01 | 6,81% |
| 2016 | 50.183.797.225,36 | 5,51% |
| 2017 | 74.121.511.057,89 | 47,70% |
| Rata-rata *Growth Ratio* | 20,01% |

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (Data Diolah)

Rata-rata Rasio Pertumbuhan Kabupaten Flores Timur selama periode 3 tahun sebesar 20,01%, ini berarti pertumbuhan PAD tahun bersangkutan besar jika dibandingkan tahun sebelumnya sehingga daerah bisa mandiri karena dana transfer akan semakin kecil seiring dengan tingginya PAD. Di Kabupaten Flores Timur terlihat pertumbuhan PAD menunjukkan peningkatan sehingga sangat stabil tentunya dalam menggali potensi pendapatan dan mengoptimalkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka kinerja keuangan daerah Kabupaten Flores Timur selama Tahun 2015-2017 yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan tersaji pada tabel IV-8 berikut ini.

Tabel.8 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Keterangan | Tahun | Rata-rata | Kecendrungan |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Rasio kemandirian | 5,96% | 4,98% | 7,56% | 6,17% | Instruktif |
| 2 | Rasio derajat desentralisasi fiskal | 5,62% | 4,74% | 6,95% | 5,77% | Sangat kurang |
| 3 | Rasio efektivitas | 91,41% | 93,23% | 82,16% | 88,93% | Kurang efektif |
| 4 | Rasio efisiensi | 1.797,01% | 2.142,54% | 1.100,12% | 1.679,89% | Tidak efisien |
| 5 | Rasio keserasian belanja tidak langsung | 61,78% | 63,27% | 84,17% | 69,74% | Belum stabil |
| 6 | Rasio keserasian belanja langsung | 38,22% | 36,73% | 15,67% | 30,21% | Belum stabil |
| 7 | Rasio pertumbuhan | 6,81% | 5,51% | 47,70% | 20,01% | Ideal |

Sumber: Mengacu pada Tabel 1 s/d 7 (Diolah)

1. Kinerja Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2015-2017. Berawal pada tahun 2015 rasio kemandirian sebesar 5,96%, kemudian turun menjadi 4,98% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 Rasio Kemandirian meningkat sebesar 7,56%. Kemandirian keuangan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan daerah dalam mengelola keuangannya haruslah dianggap sebagai sarana bagi daerah untuk melakukan intropeksi, kunci dari kemandirian tidak lain adalah daerah mampu mengoptimalkan dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerahnya, maka upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan menjadi solusinya.
2. Kinerja Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sangat kurang. Dimulai pada tahun 2015 sebesar 5,62%, turun menjadi 4,74% pada tahun 2016. Tahun 2017 rasio derajat desentralisasi fiskal pada Badan Keuangan Daerah mengalami peningkatan sebesar 6,97%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur masih sangat kurang karena masih berada dalam skala 00,00-10,00%.
3. Kinerja Keuangan BKD Kabupaten Flores Timur jika dilihat dari rasio efektivitas PAD dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan BKD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2015 sebesar 91,41% , tahun 2016 sebesar 93,23% dan pada tahun 2017 sebesar 82,16%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Flores Timur untuk tahun 2015-2017 berjalan kurang efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100%.
4. Kinerja Keuangan BKD Kabupaten Flores Timur jika lihihat dari rasio efisiensi keuangan daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2015 – 2017 sebesar 1.679,89% dapat dikatakan kurang efisien.
5. Kinerja keuangan BKD Kabupaten Flores Timur jika dilihat dari rasio keserasian belanja adalah belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2015 rasio belanja tidak langsung sebesar 61,78%, pada tahun 2016 sebesar 63,27% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 84,17%, sehingga rata-rata rasio keserasian belanja tidak langsung sebesar 69,74%. Sedangkan rasio keserasian belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 38,22%, pada tahun 2016 sebesar 36,73% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 15,67%. Sehingga rata-rata rasio keserasian belanja langsung sebesar 30,21%. Dilihat dari perhitungan rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dananya untuk kegiatan belanja tidak langsung dibandingkan dengan kegiatan belanja langsung.
6. Kinerja Keuangan BKD Kabupaten Flores Timur jika dilihat dari rasio pertumbuhan tahun 2015-2017 maka diperoleh data rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 20,01%. Pada kondisi ini masih dikatakan belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuha (*growth*) PAD tinggi. Ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

**KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang diuraikan pada Bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Mengingat peran pemerintah pusat yang masih sangat dominan, wajar jika derajat desentralisasi fiskal Pemerintah daerah masih kurang. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang kecil kepada pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.

Tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur terbilang kurang efektif dan tidak efisien. Rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum seimbang. Tingkat pertumbuhan keuangan daerah dikatakan ideal.

**Saran/Implikasi**

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil perhitungan normatif dan analisis pada Bab 4, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Flores Timur, karena mempunyai dampak yang besar, tidak hanya bagi Pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Jika pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, maka pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah hendaklah memberi informasi secara rinci kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan retribusi, karena tidak semua masyarakat mengetahui rincian kewajiban jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayarkan.
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat mengurangi berketergantungan terhadap pemerintah pusat agar dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Karena kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah serta peran PAD untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 10%.
3. Rasio Efektivitas Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan. Karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Dilihat dari perhitungan Rasio Efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya, sehingga dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja.
5. Dilihat dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja secara normatif, keseimbangan antar belanja belum menunjukkan kata seimbang. Pemerintah Daerah seharusnya lebih cenderung menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk meningkatkan kualitas output, sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur harus mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan dari Pemerintah Pusat, agar dapat mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk mengurangi besarnya dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

**Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang masih perlu direvisi pada penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian hanya dilakukan selama periode 3 tahun, karena rentang waktu yang terbatas maka penelitian ini kurang dapat digeneralisasi.
2. Penelitian dilakukan hanya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, jadi belum terlihat secara menyeluruh kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur secara luas.
3. Penelitian ini masih terbatas pada 6 variabel penelitian yaitu, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Muhibtari, A. N. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Sijabat, M. Y., C. Saleh, dan A. Wachid. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012.* Jurnal Administrasi Publik 2(2):236-242.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 : *perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 : *Pemerintah Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.